

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan harapan semua negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Faktor-faktor produksi yang mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya akan mengakibatkan meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output (Fiorentina & Galuh, 2024). Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, pemerintah secara umum dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional memiliki usaha dan kebijaksanaan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Diterapkannya otonomi daerah baik di Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumberdaya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat didaerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Latif et al., 2020)

Pembangunan ekonomi menjadi hal penting bagi suatu negara maupun daerah, karena pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan deretan proses aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan oleh suatu daerah maupun negara untuk menumbuhkan kegiatan ataupun aktivitas perekonomian agar dapat menaikkan taraf hidup masyarakat pada suatu negara ataupun wilayah pada jangka Panjang (Maryaningsih et al., 2019) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak

ukur yang umumnya digunakan untuk melihat dampak dari kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memperkirakan hasil dan kemajuan perekonomian mulai dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan keuangan suatu negara hendaknya dapat dilihat dari sintesis penciptaan tenaga kerja dan produk di negara tersebut. Penciptaan tenaga kerja dan produk harus terlihat dari total output nasional (Produk Domestik Bruto) (Diano et al., 2024). PDB (Produk domestik bruto) adalah nilai tenaga kerja dan produk yang dihasilkan di suatu negara pada tahun tertentu dengan menggunakan faktor produksi yang terkait dengan penduduknya dan penduduk dari negara lain. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Hendri et al., 2020). Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan di suatu negara juga menurun (Akmalia et al., 2024). Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari tingkat besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata dari hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah (Nehemia & Prasetyia, 2023).

Tabel 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2024

TAHUN	PETUMBUHAN (%)
2005	5,57
2006	5,89
2007	6,82
2008	7,16
2009	6,39
2010	7,35
2011	7,86
2012	7,03
2013	6,84
2014	7,36
2015	4,21
2016	4,37
2017	4,60
2018	4,69
2019	4,35
2020	-0,51
2021	3,70
2022	5,12
2023	4,67
2024	4,51

Sumber: Badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jambi.

Dari Tabel 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah provinsi Jambi selama 20 tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi provinsi jambi mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi dengan

persentase 7,86%,sedangkan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi provinsi jambi mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu -0,51%.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau daerah dari waktu ke waktu. Latar belakang pertumbuhan ekonomi melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi (Di & Gorontalo, 2023).

Alokasi belanja modal sebagai penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun, serta dapat menjadi faktor penggerak berbagai terlaksananya kegiatan ekonomi dan bisnis (Sevigo, 2022). Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak (Romadhon & Nawawi, 2024). Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi dan didukung dengan kondisi geografis yang produktif akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Meningkatnya pelayanan publik akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar aktivitas masyarakat telah didukung oleh infrastruktur yang memadai (Apriliansah, 2024).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 (Tahun 2019 Pasal 55) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi” (Eliza, 2022). Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (Eka et al., 2023)). Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah

daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat (Anggara, 2021) Dalam mengelola belanja modal, pemerintah harus di dasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Alokasi belanja modal merupakan anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat dua belas bulan (Sugiyanto et al., 2020) . Alokasi belanja modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset dan menambah kekayaan daerah yang memberikan manfaat atau memperpanjang umur manfaatnya lebih dari satu periode dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin.

Tabel 1. 2 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005-2024.

TAHUN	JUMLAH (Juta Rupiah)
2005	256.945
2006	416.798
2007	422.441
2008	560.254
2009	445.681
2010	465.860
2011	518.750
2012	678.746
2013	937.986
2014	818.059
2015	791.302
2016	945.539
2017	895.648
2018	784.723
2019	866.500
2020	1.056.496

2021	449.690
2022	675.746
2023	910.534
2024	1.055.723

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (BPS)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat dimana belanja modal provinsi jambi mengalami kenaikan dan penurunan,dimana belanja modal paling tinggi ada pada tahun 2020 dengan nilai Rp.1.056.496.11,00,sedangkan pada tahun 2021 realisasi belanja modal provinsi jambi mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dengan nilai Rp.449.690.683,61.

Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa (Nuri et al., 2024). Di sisi lain. perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata (Al akbar fitriadi. 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan dianggarkan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal investasi. Besarnya penyertaan modal investasi daerah berimbang pada

pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan PP No.1/2008 Tentang Investasi, dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban investasi, pengawasan dan divestasi.

Investasi sendiri berasal dari dua sumber yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Investasi yang berasal dari dalam negeri maupun asing akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maupun provinsi. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Investasi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi (Dinh, 2019).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merujuk pada investasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan di Indonesia. Modal yang digunakan untuk investasi ini berasal dari dalam negeri dan tidak melibatkan dana asing. PMDN merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, karena berfungsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal (Winarni et al., 2020).

Penanaman Modal Asing (PMA) merujuk pada investasi yang dilakukan oleh pihak asing di dalam negeri, namun menggunakan bentuk badan usaha yang terdaftar di Indonesia. Dalam hal ini, meskipun ada komponen modal asing, investasi ini difasilitasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pada dasarnya, PMA mengarah pada investasi asing yang dilakukan melalui entitas yang berbasis di Indonesia (Nurfadhillah et al., 2023).

Tabel 1. 3 Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jambi Tahun 2005-2024.

TAHUN	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)
2005	8.468.661,800
2006	9.144.985,140
2007	9.193.509,320
2008	8.838.272,410
2009	8.048.826,250

2010	9.611.608,190
2011	4.072.389,620
2012	4.660.158,380
2013	5.236.586,600
2014	3.247.918,560
2015	3.578.523,780
2016	3.884.400,000
2017	4.260.684,800
2018	3.128.225,750
2019	4.437.380.200
2020	3.511.677.200
2021	6.204.193.900
2022	8.882.659.200
2023	10.404.989.400
2024	9.986.209.320

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

Dari Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penanaman modal dalam negeri provinsi Jambi pada tahun 2005-2024, Pada tahun 2023 nilai penanaman modal dalam negeri provinsi jambi memiliki nilai tertinggi selama 20 tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 10.404.989.400, Sedangkan pada tahun 2018 memiliki nilai terendah yaitu sebesar Rp. 3.128.225,750.

Tabel 1. 4 Penanaman Modal Asing Provinsi Jambi Tahun 2005-2024

TAHUN	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)
2005	260.015,100
2006	1.170.499,820
2007	1.171.499,820
2008	1.982.487,470
2009	1.817.216,280
2010	2.005.272,450
2011	2.923.781,160
2012	3.416.087,090
2013	2.554.144,370
2014	1.423.027,930
2015	1.944.938,140

2016	995.156,280
2017	1.253.170,700
2018	1.672.993,360
2019	54.570.400
2020	26.967.400
2021	50.857.900
2022	39.202.600
2023	667.197.000
2024	1.584.505,610

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

Dari Tabel 1.4 Menunjukkan jumlah penanaman modal asing provinsi jambi pada tahun 2005-2024, Dimana pada tahun 2012 jumlah nilai Penanaman Modal Asing Provinsi Jambi memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 3.416.087,090, Sedangkan pada tahun 2020 jumlah nilai Penanaman Modal Asing Provinsi Jambi memiliki nilai terendah yaitu sebesar Rp. 26.967.400.

Adanya penanaman modal baik berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diharapkan memberikan stimulus dalam perekonomian di daerah. Investasi yang dilakukan di daerah diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah khususnya yang menjadi lokasi penanaman modal. Total investasi asing dan investasi dalam negeri baik pemerintah maupun swasta merupakan salah satu variabel dalam perhitungan pendapatan nasional yang menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi, karena itu investasi seharusnya dijaga kestabilan perkembangannya dan terus diupayakan untuk meningkat (Anwar & Salmah, 2024).

Investasi yang kondusif menjadi syarat mutlak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi lingkungan usaha yang kondusif guna menarik minat investor menanamkan modalnya di daerah baik yang berasal dari dalam dan luar daerah maupun asing. Dengan meningkatnya investasi swasta, diharapkan akan dapat

mengatasi keterbatasan pemerintah yang selanjutnya akan semakin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Belloumi & Alshehry, 2021).

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang dan jasa di masa depan, investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator kenaikan pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dimana ketika Investasi mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Namun faktanya, pada tahun 2019-2020 Investasi mengalami kenaikan sebesar (4,22%), sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar (-0,51%), maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA), Belanja modal, dan Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh PMDN, PMA dan Belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Perkembangan Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi.
2. Menganalisis Pengaruh Investasi domestik (PMDN), investasi asing (PMA), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh investasi pada penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi

1. Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan salah satu syarat untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh penulis selama melakukan proses pembelajaran di Universitas Jambi.
2. Bagi Akademis, sebagai bahan tambahan yang diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan referensi dalam memilih objek penelitian dan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.